

#

JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK, Vol. 1, No.1, April, 2013

KAJIAN DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REDENOMINASI RUPIAH

Nuralam*

*Fakultas Ilmu Ekonomi Uncen Jayapura

Abstract :

This article is the brainchild of the government's policy plan that will do the rupiah redenomination. As we know that the core of the currency redenomination is a simplification of the digits disappear rupiah. The study in this article analyzes the impact of more negative and positive when the rupiah redenomination policy actually done by the government. History, concepts and economic analysis both micro and macro equipped in this article. some case studies on the impact on the economy in Indonesia to be part of exciting to be associated with the redenomination policy. The final conclusion of this article suggests that if done then the rupiah redenomination policy needs to be studied more in depth about the impact on society, and not just the mere pursuit of prestige. Thoroughly and gradual socialization is an important recommendation in this article.

Abstrak : Artikel ini merupakan hasil pemikiran terhadap rencana kebijakan pemerintah meredenominasi mata uang rupiah. Sebagaimana kita tahu bahwa inti dari redenominasi adalah penyederhanaan mata uang dengan menghilangkan digit nilai rupiah. Kajian dalam artikel ini lebih banyak menganalisa dampak negatif dan positif apabila rupiah benar-benar akan diredenominasi oleh pemerintah. Sejarah, konsep dan analisa ekonomi baik secara mikro maupun makro dilengkapi pula dalam artikel ini. studi kasus pada beberapa dampak terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia menjadi bagian menarik untuk dihubungkan dengan kebijakan redenominasi. Kesimpulan akhir dari artikel ini mengemukakan bahwa apabila kebijakan redenominasi rupiah dilakukan maka perlu dikaji lebih mendalam tentang dampaknya terhadap masyarakat, dan bukan hanya mengejar gengsi belaka. Sosialisasi secara menyeluruh dan bertahap adalah rekomendasi yang penting dalam artikel ini.

Keywords : Impact, Implementation, Policy, Redenominasi, Rupiah

Salah satu kebijakan dibidang ekonomi keuangan yang saat ini lagi gencargencarnya di wacanakan adalah masalah redenominasi rupiah. Wacana ini sebenarnya sudah di beritakan Sekitar 2 tahun yang lalu, 2011 Bank Indonesia (BI) mewacanakan agar Nilai Nominal Rupiah dilakukan penyesuaian dengan menghilangkan tiga digit angka belakang yang dikenal dengan istilah Redenominasi. Saat itu oleh Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyampaikan melalui media cetak dan elektronik, bahwa kebijakan ini butuh waktu sekitar 10 tahun (2011 - 2020) untuk sosialisasi, komunikasi dan konsultasi publik, tentunya agar sebelum kebijakan ini diimplementasikan betul-betul sudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu semua elemen masyarakat (yang sudah memahami dan mengerti) diharapkan menjadi informan setia untuk men-

sosialisasikan program redenominasi ke seluruh pelosok tanah air.

BI merasa perlu melakukan redenominasi rupiah. BI mewacanakan rencana redenominasi rupiah dengan kata lain pengurangan nilai pecahan rupiah tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Ternyata wacana penerapan Redenominasi Rupiah dalam 6 bulan terakhir semakin gencar dilontarkan baik melalui media cetak, elektronik bahkan menjadi topik menarik pada diskusi-diskusi publik di kampus Perguruan Tinggi, maupun dilembaga pemerintahan. Bahkan sudah masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2013. Melihat dari keseriusan Pemerintah bersama DPR RI, maka akselerasi penerapan Redenominasi Rupiah tidak perlu menunggu sampai tahun 2020.

Berbagai spekulasi pro dan kontra pun terjadi akibat rencana kebijakan ini, banyak

kalangan yang mempertanyakan manfaat dan keuntungan dari kebijakan ini, tidak heran para pengamat ekonomi mulai meluncurkan komentarnya baik yang mendukung maupun yang sama sekali tidak mendukung. Selain pengamat, kalangan pengusaha pun tak luput dari pengaruh rencana kebijakan ini, para pengusaha mulai bertanya dampak yang positif bagi kelangsungan usaha mereka apabila kebijakan ini benar-benar dilaksanakan. Para kalangan masyarakat bawah, khususnya para pedagang kecil dipasar-pasar mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan redenominasi rupiah, pada prinsipnya mereka hanya tahu berdagang dengan nilai jual beli rupiah, istilah redenominasi bagi mereka masih asing didengar bahkan tidak terlalu paham.

Salah satu yang harus diperhatikan dalam redenominasi adalah *inflasi*. Jangan sampai ada dampak berat terhadap *inflasi*. Walaupun memang tetap diwujudkan kebijakan redenominasi, jangan sampai ada dampak negatif yang memberatkan. Rencana pemberlakuan redenominasi terhadap rupiah masih harus melalui proses yang panjang karena tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Terkait dengan polemic tersebut, apapun hasilnya bagi kita kalangan masyarakat bawah selaku pelaku ekonomi sangat berharap banyak akan dampak positif. Walaupun pada akhirnya berdampak yang negatif maka pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu sangat perlu untuk melakukan kajian-kajian yang komprehensi dan konstruktif guna memecahkan problem tersebut. banyak harapan yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah dalam kewenangan membuat dan melaksanakan kebijakan. Harapannya bahwa kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah paling tidak dapat merubah keadaan yang lebih baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Bukan sebaliknya malah lebih memperparah keadaan dan menyengsarakan masyarakat.

PEMBAHASAN

Konsep Redenominasi

Istilah ini mengundang banyak tanya. Tak hanya awam, para pengusaha dan ekonom pun masih menimbang-timbang, apa keuntungan dan dampak redenominasi ini. Secara konseptual pengertian Redenominasi Rupiah adalah penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan rupiah dan harga barang/jasa secara bersamaan tanpa mengurangi daya beli. Atau dengan perkataan lain, Proses dimana suatu Pemerintahan membuang beberapa digit di belakang mata uangnya untuk menyederhanakan penulisan, pencatatan, transaksi, dan penyebutan ke depannya, tetapi tidak mengurangi nilai dari transaksi tersebut.

Menurut Juanda (2013 : 2) redenominasi merupakan penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar uang itu sendiri, disertai dengan penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilai tukar dengan valuta asing (*valas*). Juanda melanjutkan bahwa pengertian dari redenominasi adalah penyederhanaan dari satuan harga maupun nilai mata uang yang ada. Misalnya satuan Rp. 1000 disederhanakan menjadi Rp.1. Hal ini dilakukan berlaku menyeluruh kesemua harga-harga barang dan jasa di negara tersebut.

Redenominasi terjadi ketika suatu negara mengubah nilai nominal mata uangnya. Nilai mata uangnya sama dengan yang lama, hanya penulisan nominalnya lebih sederhana. Redenominasi biasanya digunakan untuk menjawab problem dalam pencatatan statistik dan akuntansi, agar menjadi lebih sederhana. Program Redenominasi dapat dilakukan ketika suatu negara berada dalam kondisi EKONOMI STABIL (indikator makroekonomi relatif stabil, seperti Pertumbuhan Ekonomi di atas 5%, Tingkat Inflasi di bawah 5%, Nilai Tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan beberapa indikator lainnya). Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1997/1998, secara berangsur

aktivitas perekonomian terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Hal ini terlihat dari kedua indikator makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai angka antara 6,0 - 6,5% per tahun dan tingkat inflasi cenderung menurun pada kisaran antara 4,5 - 5,5% per tahun. Kedua indikator makroekonomi tersebut menjadi acuan utama penerapan kebijakan redenominasi.

Berdasarkan data *ehow.com*, sejumlah negara telah melakukan redenominasi mata uang mereka sebanyak lebih kurang 70 kali, dalam lima decade terakhir hingga tahun 2011. Sebagian besar redenominasi tersebut menyederhanakan setidaknya satu digit angka nol. Beberapa negara berhasil melakukan redenominasi pada mata uang mereka ialah Turki, salah satu negara yang banyak mendapat sorotan karena kesuksesan redenominasinya yang dilakukan pada tahun 2005. Sedangkan negara yang tidak berhasil dalam meredenominasi mata uangnya adalah Zimbabwe, Brasil, Argentina dan Ghana.

Menurut Juanda (2013 : 2) ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan penyederhanaan satuan nilai tukar, yaitu *pertama*, kondisi ekonomi yang stabil; *kedua*, inflasi yang terjaga rendah; dan *ketiga* adanya jaminan stabilitas harga.

Tujuan Redenominasi

Secara sederhana tujuan redenominasi adalah sebagai efisiensi penghitungan dalam sistem pembayaran. Berikut ini beberapa tujuan diimplementasikannya program redenominasi sebagai berikut :

- memfasilitasi ekspektasi inflasi yang semakin rendah;
- dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran tunai dan non tunai serta pengolahan data statistik;
- efisiensi proses input data, pengolahan database, pelaporan data, serta penggunaan memori data, dan efisiensi operasional dalam penyesuaian *hardware & software* sistem akunting & teknologi informasi;

- untuk menciptakan efisiensi biaya pencetakan uang, masyarakat beralih ke uang logam (koin) yang lebih tahan lama;
- dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat & kebanggaan masyarakat terhadap rupiah, diantaranya mengurangi risiko *Currency Substitution*, mempermudah transaksi perdagangan barang dan jasa dengan negara lain;
- dengan redenominasi juga membuat penggunaan jumlah digit mata uang rupiah yang lebih sederhana dalam praktik transaksi sehari-hari akan lebih mendukung proses belajar mengajar pada pendidikan dasar;
- dan juga mendukung integrasi sistem pembayaran nasional ke dalam sistem-sistem pembayaran internasional, dan ;
- menjadikan mata uang Rupiah setara untuk memfasilitasi ASEAN Economic Community 2015.

Implementasi Redenominasi

Dalam skenario pemerintah, mata uang akan dikecilkan sebanyak tiga digit angka belakang. Yakni dengan membagi semua mata uang dengan angka Rp. 1.000,-. Misalnya Rp. 100.000,- menjadi Rp. 1.000,-. Implementasinya, dengan memiliki uang sekarang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah kebijakan Redenominasi diberlakukan, maka nilai uang menjadi HANYA Rp. 1.000,- (seribu rupiah) MATA UANG BARU; Nilai Rp. 1.000,- tersebut bisa dipakai untuk membeli barang (transaksi) yang nilainya setara Rp. 1.000.000,- sebelum Redenominasi.

Melalui kebijakan ini, secara sepiantas tidak ada perubahan terhadap perekonomian nasional karena harga-harga barang dan jasa akan menyusul dibagi dengan angka Rp. 1.000,-. Dengan perkataan lain, harga-harga pada barang industri produksi dan jasa relatif tidak terpengaruh. Benarkah demikian ? Jawabannya masih harus menunggu. Oleh karena itu untuk mendukung implementasi kebijakan ini maka menurut hemat penulis, pemerintah harus serius dalam mensosialisasikan redenominasi rupiah di kalangan

masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Setidaknya ada 3 alasan Indonesia menerapkan redenominasi, *pertama* inflasi di Indonesia terkendali, yaitu dibawah 10 persen ; *kedua*, utang pemerintah dari persentase Produk Domestik Bruto (PDB) terus turun. Menurut hitungannya, utang Indonesia sekitar 20 persen dari PDB, dan *ketiga* adalah alasan karena saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang dalam keadaan yang stabil.

Dampak Implementasi Kebijakan

Setiap kebijakan atau program yang akan diberlakukan pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Tentu harapan pemerintah dan seluruh masyarakat dampak positiflah yang akan diperoleh dari program Redenominasi ini. Namun demikian, ada beberapa hal yang menurut penulis harus diwaspadai akan terjadi di dalam perekonomian nasional, jika proses Redenominasi ini tidak tuntas, antara lain *pertama* harga-harga barang dan jasa justru bisa menyebabkan terjadinya inflasi, jika tidak seluruh harga barang bergerak mengikuti pembagian Rp. 1.000,- Kondisi ini bisa terjadi jika control harga barang tidak terjadi, khususnya harga yang menjadi bahan baku dari industri produksi yang merupakan *unobservable variable*; dan *kedua*, adanya Perkiraan angka wajar inflasi dan suku bunga dapat berubah karena untuk menghitung inflasi pun *variable* terbukanya cukup banyak.

Sedangkan menurut Iskandar Simorangkir (*Tempo*, 24-30 Desember 2012) ada beberapa resiko yang perlu diantisipasi, berkaitan dengan penerapan redenominasi, antara lain *pertama*, potensi kenaikan harga barang dan jasa akibat pembulatan harga yang berlebihan, resiko ini terkait dengan proses pembulatan harga-harga “ke atas”, yang terjadi secara berlebihan untuk kepentingan pribadi. Resiko ini dapat dimitigasi dengan undang-undang yang tegas dengan mengatur praktek pembulatan harga yang dianggap wajar, disertai

pengawasan dan penindakan tegas terhadap perilaku curang dari instansi yang berwenang. Pada masa transisi perlu pencantuman *dual price tagging* (harga sebelum dan sesudah redenominasi); Contoh: Harga Coto Makassar yang sebelum redenominasi sebesar Rp. 20.000,- per Mangkok. Setelah redenominasi menjadi hanya Rp. 20 per mangkok. Jika Pemerintah tidak mengawasi secara intensif (operasi pasar) bisa jadi Pemilik Warung Coto, menaikkan harga menjadi Rp. 40, per mangkok (naik 100%) atau malah menaikkan menjadi Rp. 200,- per mangkok, naik 900% artinya terjadi HIPER-INFLASI. *Kedua*, Resiko penolakan dan ketidakpahaman program redenominasi oleh sebagian masyarakat dapat dimitigasi dengan komunikasi, sosialisasi dan konsultasi publik ke seluruh pelosok daerah; dan *ketiga*, Resiko perselisihan karena keliru mengartikan dokumen yang bernilai uang dalam uang rupiah sebelum dan sesudah redenominasi, dapat dimitigasi melalui pengaturan yang jelas mengenai masa berlaku suatu denominasi tertentu dalam dokumen.

Menurut Juanda, (2013 : 3) kebijakan redenominasi tidak akan terkena dampak negative terhadap pasar modal Indonesia. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang cukup baik, karena akan banyak penghematan uang yang akan terjadi.

Dampak lain yang perlu diperhatikan menurut penulis adalah dampak psikologis masyarakat dan investor. Pemahaman masyarakat terhadap redenominasi belum menyeluruh, cenderung masyarakat menganggap redenominasi adalah pemotongan nilai nominal rupiah yang lazimnya dalam istilah ekonomi disebut dengan *Sanering*. *Sanering* menurut Juanda (2013 : 5) adalah merupakan upaya memotong rupiah karena melejitnya angka inflasi yang tak kunjung turun atau inflasi tidak terkendali. Masyarakat Indonesia harus memahami bahwa *sanering* dan redenominasi dilakukan pada angka inflasi yang berbeda. *Sanering* dilakukan saat angka inflasi tinggi, sedangkan redenominasi diterapkan saat angka inflasi rendah.

Sanering dilakukan saat kinerja ekonomi memburuk, sedangkan redenominasi dijalankan saat kinerja ekonomi prima.

Dampak psikologisnya lainnya adalah masyarakat sudah terbiasa dengan memegang uang yang banyak tetapi akibat redenominasi kemungkinan memegang uang banyak akan berkurang. Bagi pengusaha dampak psikologisnya bisa saja terjadi pada nilai produksi barang yang biasanya dihargai dengan angka nol yang banyak, namun redenominasi menghendaki penyederhanaan nilai nominal. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi yang baik. BI harus mampu mensosialisasikan sampai kedaerah terpencil, memperkenalkan redenominasi. Sehingga BI harus menggandeng pemerintah daerah.

Jika pelaku bisnis yakin bahwa ekonomi berkinerja baik, redenominasi bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi, redenominasi mengakibatkan angka inflasi meningkat apabila pelaku bisnis berpresepsi ekonomi melambat atau memburuk ketika kebijakan itu diterapkan. Melejitnya angka inflasi itulah yang membuat daya beli masyarakat loyo. Disamping itu, stabilitas politik sangat dibutuhkan untuk memunculkan dampak psikologis yang positif kepada pelaku bisnis dalam menyikapi redenominasi. Ekonomi yang kuat dan politik yang stabil akan memudahkan proses redenominasi. Alhasil, nilai mata uang sama, baik sebelum atau sesudah redenominasi. Karena itu, BI harus menyamakan persepsi dengan pelaku bisnis dalam menentukan periode kinerja ekonomi.

PENUTUP

Apabila dilakukan analisis atas berbagai faktor baik yang *observable* maupun *unobservable* dalam perekonomian Indonesia 2013 - 2014, maka implementasi redenominasi memiliki probabilitas keberhasilan lebih kecil ketimbang kegagalan. Alasannya, Tahun 2013 adalah tahun "Spekulasi Politik", di mana kondisi sedikit lebih

memanas di mana posisi perpolitikan berimbang. Inti permasalahan ekonomi Indonesia saat ini bukan terletak pada banyaknya "digit" rupiah tetapi lebih kepada "given factor" dari ekonomi global, sehingga redenominasi lebih banyak ruginya dibanding untungnya dalam jangka pendek.

Seandainya pun redenominasi diimplementasikan relatif tidak akan menambah positif yang berlebihan terhadap perekonomian nasional dan khususnya industri keuangan, tetapi apabila tidak dilakukan redenominasi hingga tahun 2014 akan lebih baik.

Harapan penulis, periode 2013 - 2014 adalah saat sosialisasi, komunikasi dan konsultasi publik, sehingga setelah presiden terpilih pada tahun 2014 baru akan diimplementasikan secara bertahap, yang pada gilirannya seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat dari sebuah kebijakan atau program yang dilakukan secara terencana, terpadu dan komprehensif.

Redenominasi rupiah harus dibarengi pembangunan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Jangan sampai persepsi yang timbul adalah pemotongan nilai mata uang yang membuat masyarakat menarik dana mereka dari bank dan melakukan investasi keluar negeri. Rencana redenominasi harus dilakukan secara hati-hati. Dampak psikologis kepada masyarakat dan investor akan tergantung dengan bagaimana BI melakukan sosialisasi. Redenominasi jangan sampai menimbulkan gejolak stabilitas ekonomi. Kesiapan masyarakat menjadi point penting bagi BI. Redenominasi sebetulnya sangat baik, tetapi harus dipahami jika kesiapan masyarakat menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Kesiapan masyarakat juga diperlukan karena tanpa kesiapan masyarakat maka akan rentan terjadi gejolak ekonomi dimana terjadi kepanikan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Juanda, 2013, *Kajian tentang Rencana Redenominasi Rupiah dalam Sistem Keuangan Jangka Panjang di Indonesia*. Tidak dipublikasikan.
- Iskandar Simorangkir, " Saatnya Rekomendasi diterapkan", Majalah Tempo periode 24 – 30 Desember 2012.
- Nuralam, Materi Kuliah Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih.
- Nuralam, Materi Kuliah Program Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih.
- [www. Bisnis.liputan6.com/read/471962/pengusaha-ingin-rencana-redenominasi-ditunda-dulu/?related=pbr&channel=b](http://www.Bisnis.liputan6.com/read/471962/pengusaha-ingin-rencana-redenominasi-ditunda-dulu/?related=pbr&channel=b)